



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK

JL. LETJEN.MT. HARYONO KAV 45-46
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400
FAX : (021) - 22791452
(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

NOTA - DINAS

Nomor : 199 / Bag - 1 / VII / 2020

Kepada Yth. : Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
Dari : Plt. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
Perihal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Triwulan I Tahun 2020

1. Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Badan Nomor 125/STB/IV/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dalam Kegiatan Triwulan I Tahun 2020, bersama ini kami sampaikan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dalam Kegiatan Triwulan I Tahun 2020 Sekretariat BPTJ.
2. Demikian disampaikan, atas arahan dan perkenan Ibu Sekretaris BPTJ kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Juli 2020

KEPALA BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
Pelaksana Tugas

HARTATIK, SE, M.Ak

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19810914 200501 2 009

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

Format Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bagian Perencanaan dan Keuangan
Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
IKK 1 – Tingkat keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	94%		1. Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Kegiatan	1. Saat ini progres penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam draft Renstra BPTJ periode tahun 2020-2024 telah diselaraskan dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) dan akan menyesuaikan juga dengan Renstra Kementerian Perhubungan. 2. Menyusun draft major project (MP) BPTJ untuk Renstra Kemenhub 2020 – 2024.	Draft Renstra BPTJ periode tahun 2020-2024	> Dalam penyusunan Renstra BPTJ Tahun 2020-2024, BPTJ kesulitan untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPTJ karena IKU dalam draft Renstra Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 berbeda dengan IKU yang menjadi target BPTJ sebagaimana tercantum dalam Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (RITJ) Tahun 2018-2019. > Selain itu BPTJ terkendala dengan Biaya penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 karena kegiatan ini tidak dianggarkan di RKA BPTJ Tahun 2019.	Akan dilaksanakan : Finalisasi Rencana Strategis BPTJ
			2. Penyusunan RKA-KL	Penyusunan RKA Pagu Kebutuhan BPTJ T.A. 2021 dengan melakukan rapat dan kegiatan sbb: 1. Pembahasan Verifikasi Usulan Pagu Kebutuhan BPTJ T.A. 2021 (17 – 18 Februari 2020) 2. Rapat Finalisasi Verifikasi Data Dukung Pagu Kebutuhan BPTJ T.A. 2021 (20 – 22 Februari 2020) 3. Pengusulan kembali Pagu Kebutuhan BPTJ T.A. 2021 melalui aplikasi E Planning & Budgeting (23 – 31 Maret 2021) serta verifikasi unit tanggal 2 April 2020	RKA Pagu Kebutuhan BPTJ T.A. 2021	> Proses verifikasi belum maksimal dikarenakan Bagian Perencanaan sebagai verifikator juga berfungsi sebagai penginput data karena hanya ada satu user yang bisa mengakses aplikasi E-Planning. > Masih terdapat usulan kegiatan yang kurang siap data dukung yang dibutuhkan dan masih membutuhkan koordinasi lanjut dengan pihak terkait. > Untuk kegiatan yang membutuhkan asset daerah, masih membutuhkan peninjauan kembali dan data dukung dari pemerintah daerah sebagai bukti kesiapan/komitmen . > Terdapat duplikasi perencanaan kegiatan di dalam lingkungan BPTJ, Contohnya usulan rencana kegiatan Subdit Lalu Lintas Kereta Api Dit. Lalu Lintas yang merupakan tupoksi Subdit Integrasi Prasarana Dit. Prasarana. > Masih adanya tumpang tindih terkait kewenangan yang bertanggung jawab dan yang mengerjakan kegiatan terkait perkeretaapian.	Sudah dilaksanakan: > Penyampaian surat permohonan penambahan user aplikasi eplanning kepada pihak Pustikom sehingga pada saat memasuki RKA tahun 2021, masing – masing unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ sudah dapat mengakses aplikasi e-planning dengan user tersebut. >Terkait duplikasi usulan rencana kegiatan di lingkungan BPTJ telah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal. Akan dilaksanakan : > BPTJ akan menyampaikan surat kepada Ditjen KA yang memuat daftar usulan kegiatan BPTJ Tahun 2021 sebelum Pagu Kebutuhan Tahun 2021 ditetapkan > Terkait data dukung sebagai bukti kesiapan pemerintah daerah akan dilakukan koordinasi lanjut oleh BPTJ dengan pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
						<p>> BPTJ memiliki dokumen Rencana Induk yaitu Perpres No.55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029 yang memuat 9 Pilar dan pilar pertama adalah Peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan tetapi tugas ini tidak dicantumkan dalam PM 110 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam pengusulan kegiatan terkait peningkatan keselamatan dalam Pagu Kebutuhan Tahun 2021.</p> <p>> Masih terdapat kekurangan dalam penyusunan data dukung seperti TOR/RAB, sehingga dibutuhkan pelatihan untuk menambah pengetahuan SDM BPTJ dalam membuat dan menyusun data dukung yang baik dan benar sesuai dengan aturan terkait</p>	<p>> Akan direncanakan pelatihan atau sosialisasi tentang penyusunan dokumen perencanaan untuk SDM di lingkungan BPTJ.</p>
			<p>3. Penyiapan Bahan Rapat Pimpinan</p>	<p>Penyiapan bahan rapat pimpinan yang telah terlaksana untuk kebutuhan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Koordinasi Manajemen Arus Mudik dengan Menko Maritim dan Investasi (19 Maret 2020). 2. Rapat Kerja Komisi V DPR RI Persiapan Infrastruktur dan Transportasi Pendukung 5 Destinasi Prioritas Wisata (03 Februari 2020). 3. Rapat Entry Meeting dengan BPK (19 Maret 2020). 4. Seminar Nasional Usaha Perkuatan Jaringan Logistik Indonesia Melalui Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur menuju 5 Besar Ekonomi Dunia 2045 di Aula ITB Bandung. Seminar dilakukan tanggal 02 Februari 2020. 5. Rapim penyerapan Anggaran 2020 (27 Februari 2020). 	<p>Bahan Rapim</p>	<p>Bahan rapat pimpinan ada yang bersumber dari direktorat teknis. Hal ini menyebabkan lamanya untuk mendapatkan bahan tersebut sedangkan waktu penyiapan bahan rapim terbatas.</p>	<p>Sudah dilaksanakan: Koordinasi lebih awal sehingga diharapkan direktorat teknis yg terkait dengan kebutuhan bahan rapim dapat menyiapkan lebih awal.</p>
			<p>4. Rapat Koordinasi Teknis (RAKORNIS) Pembangunan Transportasi Jabodetabek</p>	<p>Implementasi yang telah dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi teknis RITJ tahun 2020 (4 Februari 2020) 2. Rapat Persiapan <ol style="list-style-type: none"> a. Rapat Penyusunan Kepanitiaan dan Bahan Rakor (8 Januari 2020) b. Rapat Pra Rakor (22 Januari 2020) c. Rapat Panitia Persiapan Rakor (29 Januari 2020) 	<p>Laporan dan Berita Acara Rakornis RITJ Tahun 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat usulan dari kegiatan pemerintah daerah kepada BPTJ namun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan persoalan terkait kewenangan BPTJ (contoh : Underpass Bojonggede). 2. Baik BPTJ maupun di tingkat Kementerian/Lembaga lainnya sebagai perwakilan pemerintah pusat belum memiliki rencana aksi baik dalam jangka pendek atau jangka panjang dalam penyelesaian RITJ. Rencana aksi yang nantinya menjadi acuan pemerintah 	<p>Akan dilaksanakan: > Menindaklanjuti matrik Rencana Aksi RITJ 2020 – 2024 per wilayah yang harus diselesaikan dan ditandatangani oleh kepala daerah paling lambat April 2020 atau selambat – lambatnya sebelum musrenbangda</p> <p>> Akan dilakukan sosialisasi atau pertemuan yang membahas permasalahan yang timbul terkait transportasi dan sumber pendanaan</p>

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
						<p>daerah dalam menyusun rencana aksi daerah terkait transportasi. Hal ini yang berakibat pada kurang jelasnya pembagian tugas dalam pelaksanaan program dan kegiatan RITJ khususnya pembagian tanggung jawab dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p> <p>Selain itu baik dalam penyusunan secara rinci berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan dan juga dalam hal pendanaan juga masih belum jelas.</p> <p>3. Terkendala dengan kurangnya SDM untuk dapat fokus /concern untuk implementasi RITJ.</p>	<p>pembangunan untuk menyelesaikan program kegiatan serta kelengkapan persyaratan sampai tahun 2024.</p>
			5. Koordinasi Kelembagaan	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan		Catatan : Subbag Perencanaan tidak melaksanakan
			6. Penyusunan SPIP BPTJ	Telah dilaksanakan rapat 1 kali: - RDK Evaluasi SPIP 2019 dan Persiapan SPIP 2020 (Tanggal 10 Maret)	Data Dukung Maturitas SPIP 2019	Ditemukan sejumlah kekurangan data dukung SPIP 2019 sehingga dapat berpengaruh pada nilai SPIP dari BPKP.	Memperbaiki data dukung dan melaksanakan BIMTEK Penyusunan Dokumen Penyelenggaraan dan Dokumen Maturitas SPIP 2020
			7. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana dan Program	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dilakukan perhitungan atas Capaian Kinerja (IKU) dan Pelaksanaan Rencana dan Program	Menyelenggarakan Rapat bersama Direktorat dan Bagian dalam rangka penyusunan laporan Triwulan atas Capaian Kinerja (IK) dan Pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan
			8. Monitoring dan Evaluasi Daya Serap Anggaran	<p>1. Yang telah dilakukan terkait Revisi Anggaran :</p> <p>a. Telah dilakukan Revisi Buka Blokir (DIPA-DJA) dan sudah disetujui DJA Pada tanggal 11 Maret 2020 atas blokir DED FS LRT Bandara Soeta s.d. Kemayoran.</p> <p>b. Telah dilakukan Revisi DIPA-Kanwil untuk penganggaran penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lingkungan BPTJ tanggal 3 April 2020.</p> <p>2. Telah dilaksanakan terkait Monitoring Daya Serap Anggaran :</p> <p>a. Membuat Laporan Daya Serap Anggaran Bulanan.</p> <p>b. Menginput data kontraktual 2020 ke dalam e-monitoring dan mengupdate daya serap anggaran secara berkala di e-monitoring Kemenhub.</p>	<p>1. ADK dan DIPA Petikan Revisi 1 - DJA</p> <p>2. ADK dan DIPA Petikan Revisi 2 - Kanwil</p> <p>3. Laporan Daya Serap Anggaran Bulanan</p> <p>4. E-monitoring Kemenhub (Online Based)</p>	<p>Terkait monitoring kegiatan khususnya kegiatan kontraktual, terdapat beberapa perubahan substansi maupun perubahan paket kegiatan yang dikontrakkan. Semua usulan sudah disampaikan melalui Nota Dinas dari masing-masing Direktorat, namun karena per 1 Februari 2020 proses revisi/modul penganggaran sudah harus melalui Web Sakti, maka semua perubahan harus diinput di Sakti.</p>	<p>Menyisir kembali semua usulan perubahan yang sudah diinput di Aplikasi RKA-KL dan melakukan penyesuaian di Web Sakti sehingga proses pelaksanaan keuangan dapat diandalkan atau bersifat realible dan up todate.</p>
			9. Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak	1. Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa monitoring realisasi Target PNBPT 2020 berjalan dengan baik.	1. Laporan Realisasi PNBPT Bulanan	Proses Pegajuan Usulan Pagu Penggunaan telah sampai pada pembahasan di DJA dan disampaikan	> Berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Direktorat Angkutan terkait revisi TOR-RAB Kegiatan yang disulkan oleh Direktorat

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
				2. Membuat Laporan Bulanan Target dan Realisasi PNBPN 2020. 3. Membuat usulan Proposal Pagu Penggunaan PNBPN TA 2020, 2021, dan 2022.	2. Proposal Usulan Pagu Penggunaan PNBPN BPTJ TA 2020, 2021 dan 2022	banwa perlu unakukannya revisi terkan TOR-RAB atas usulan pagu penggunaan tersebut.	yang usulkan oleh direktorat terkait. >Berkoordinasi dengan Biro Keuangan Kemenhub (Bagian PNBPN) dan Direktorat PNBPN K/L Direktorat Jenderal Anggaran supaya proses pengajuan pagu penggunaan dapat tetap berjalan seiring dilakukannya revisi terhadap TOR-RAB.
			10. Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)	1. Inventarisasi Barang Milik Negara yang sudah tercatat di Laporan SIMAK BMN BPTJ untuk mendapatkan data BMN dengan kondisi baik, rusak, rusak berat dan hilang 2. Inventarisasi Barang Milik Negara dalam rangka penghapusan BMN	1. Laporan Invetarisasi Barang Milik Negara BPTJ 2020 2. Berita Acara/Surat Keputusan Penghapusan BMN dari DJKN	BPTJ belum melaksanakan inverarisasi BMN yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2019 sehingga laporan SIMAK BMN tahun 2019 belum menggambarkan data sebenarnya kondisi BMN BPTJ dan belum bisa mengajukan penghapusan BMN terhadap BMN yang rusak, rusa berat atau hilang.	Subbagian keuangan da pengelolaan BMN akan berkoordinasi dengan Subbagian umum dan Kepala Terminal di Lingkungan BPTJ untuk menginventarisasi BMN yang dimiliki BPTJ agar dapat mengusulkan penghapusan BMN terhadap BMN yang rusak, rusak berat atau hilang.
			11. Penyusunan Laporan SIMAK BMN	1. Melakukan sosialisasi aplikasi SIMAK BMN dan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai BMN 2. Meningkatkan kompetensi operator SIMAK BMN, penyusunan Laporan SIMAK BMN dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro LPP BMN atau DJKN Kemenkeu 3. Menyiapkan data dukung penyusunan Laporan SIMAK BMN seperti SPM, SP2D, Kwitansi/Faktur, BAST/BPP untuk diinput ke dalam aplikas SIMAK BMN	1. Laporan BMN BPTJ Semesteran dan Tahunan 2. Berita Acara Rekonsiliasi SIMAK BMN Semesteran dan Tahunan dengan Biro LPP BMN Kemenhub	BPTJ telah menyusuna Laporan BMN Tahunan 2019 dan semester II Tahun 2019 Unaudited dan Audited. Nilai BMN Unaudited dan audited terdapat perbedaan karena terjadi koreksi pada akun persediaan, akun peralatan dan mesin dan akun ATB (hasil rekomendasi BPK). Hal ini terjadi karena terjadi kesalahan penganggaran pada pengadaan barang persediaan dan asset pada pengadaan tahun 2019.	PPK agar lebih cermat mengidentifikasi akun asset dan persediaan agar tidak terjadi lagi kesalahan penganggaran sehingga dapat menghasilkan Laporan BMN yang akurat.
			12. Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Melalui Aplikasi SAIBA	1. Melakukan sosialisasi aplikasi SAIBA dan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai penyusunan laporan keuangan 2. Meningkatkan kompetensi operator SAIBA, penyusunan Laporan Keuangan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Biro Keuangan, KPPN atau Kemenkeu 3. Menyiapkan data dukung penyusunan Laporan Keuangan seperti SPM, SP2D, Kwitansi/Faktur, BAST/BPP, Laporan penerimaan negara (PNBP) untuk diinput ke dalam aplikas SAIBA 4. Melakukan pelaporan LPJ Bendahara secara online dengan aplikasi sprint setiap bulan dengan KPPN sebelum tanggal 10 setiap bulannya	1. Laporan Keuangan BPTJ Semester I dan II, triwulan III dan Tahunan 2. Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I dan II, triwulan III dan Tahunan dengan Biro Keuangan Kemenhub 3. Berita Acara Rekonsiliasi bulanan dengan KPPN melalui aplikas e-Rekon	Aplikasi SAIBA mengalami updating setiap tahun. Aplikasi SAIBA biasanya baru dapat digunakan kembali sekitar bulan April atau Mei. Operator SAIBA harus terus mengupdate aplikasi SAIBA dan mengupdate peraturan-peraturan terbaru tentang penyusunan Laporan Keuangan.	Subbagian keuangan dan pengelolaan BMN terus berkoordinasi dengan Biro Keuangan, KPPN, BPK dan Kemenkeu apabila terdapat updating aplikas SAIBA dan peraturan-peraturan terbaru tentang penyusunan Laporan Keuangan.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			13. Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	1. Melakukan sosialisasi aplikasi Silabi dan sosialisasi peraturan-peraturan mengenai perbendaharaan 2. Meningkatkan kompetensi bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Biro Keuangan, KPPN atau Kemenkeu 3. Menyiapkan data dukung penyusunan Laporan Perbendaharaan seperti SPM, SP2D, Kwitansi/Faktur, BAST/BPP, Laporan penerimaan negara (PNBP), Billing Setoran Pajak untuk diinput ke dalam aplikasi Silabi 4. Melakukan pelaporan LPJ Bendahara secara online dengan aplikasi sprint setiap bulan dengan KPPN sebelum tanggal 10 setiap bulannya	1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan (Bulanan) 2. Berita Acara Rekonsiliasi dan Pemeriksaan Kas antara Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran (setiap bulan) 3. Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku LS Bendahara, Buku UP	Aplikasi SPM dan aplikasi silabi menggunakan laptop yang sama sehingga apabila ingin menggunakan aplikasi silabi harus bergantian dengan operator SPM. Aplikasi SPM dan silabi menggunakan laptop yang saa untuk meminimalkan eror yang terjadi pada aplikasi. Kadang kaa terjadi selisih atau perbedaan LPJ bendahara dengan KPPN.	Bendahara pengeluaran dan penerimaan berusaha menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada KPPN tepat waktu agar tidak mendapat teguran dari Kepala KPPN. Bendahara dan operator SPM menggunakan aplikasi secara bergantian. Bendahara agar lebih cermat untuk menghindari selisih atau perbedaan LPJ dengan KPPN.
			14. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai peraturan-peraturan pengelolaan keuangan kepada seluruh staf pengelola keuangan di lingkungan BPTJ 2. Meningkatkan kompetensi staf pengelola keuangan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Keuangan, KPPN atau Kemenkeu 3. Menyiapkan data dukung pengelolaan administrasi keuangan seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai di lingkungan BPTJ untuk dibuatkan SPM	1. Laporan Pertanggungjawaban Pencairan Anggaran seperti pertanggungjawaban perjalanan dinas pegawai BPTJ 2. Surat Perintah Membayar (SPM)	Para pegawai atau PIC kegiatan kadang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke subbag keuangan sehingga pencairan perjalanan dinas terlambat dan berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak legkap.	Berkoordinasi dengan pegawai yang melakukan perjalanan dinas atau PIC kegiatan agar segera menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada subbag keuangan segera setelah melakukan perjalanan dinas secara lengkap
			15. Pembinaan dan Evaluasi hasil Pemeriksaan LHP/LHA dan Tindak Lanjut	1. Melaksanakan rekomendasi Itjen dan BPK terkait LHA/LHP dan temuan BPK atas Laporan Keuangan BPTJ 2. Menyiapkan data dukung yang diminta Itjen dan BPK dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan BPTJ	1. Laporan Tindak Lajut Pemeriksaan Temuan/LHP/LHA Itjen dan BPK semester I dan II setiap tahun 2. Matriks progres Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas temuan Laporan Keuangan BPTJ	Rekomendasi BPK atas temuan Laporan Keuangan BPTJ belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai rekomendasi BPK sehingga rekomendasi atas temuan BPK terus bertambah dari tahun ke tahun karena data dukung yang kurang legkap.	Menyiapkan data dukung dan berkoordinasi dengan PIC kegiatan, PPK dan BPK untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan laporan keuangan BPTJ agar temuan tersebut dapat segera tuntas.
			16. Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1. Melakukan sosialisasi penyusunan Laporan PIPK kepada penyusun dan penilai Laporan PIPK di lingkungan BPTJ 2. Membentuk Tim Penilai dan Tim Penyusun Laporan PIPK BPTJ dan menentukan akun signifikan	1. Berita Cara Pemeriksaan Laporan PIPK dari Itjen 2. Laporan PIPK BPTJ Tahunan	PIPK merupakan kegiatan yang baru dilingkungan BPTJ sehingga masih perlu pemahaman mendalam untuk menyusun laporan PIPK ini. Tim penilai PIPK harusnya dari luar subbagian keuangan, akan tetapi di luar subbagian keuangan SDM yang memahami laporan keuangan	BPTJ dapat mengundang narasumber PIPK dari Itjen atau Biro Keuangan agar semua SDM yang terlibat memahami laporan PIPK ini, menyiapkan data dukung penyusunan laporan PIPK dengan baik agar dapat menyusun laporan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran					
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	
				3. Menyiapkan data dukung penyusunan laporan PIPK BPTJ			masih minim sehingga SDM yang menjadi tim penyusun merangkap menjadi tim penilai PIPK BPTJ. Data dukung yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan PIPK ini juga cukup banyak.	PIPK yang akuntabel dan sesuai peraturan yang berlaku.
			17. Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN	<p>1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai peraturan-peraturan PSP BMN kepada seluruh staf pengelola BMN di lingkungan BPTJ</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi staf pengelola BMN dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro LPP BMN atau Kemenkeu.</p> <p>3. Menyiapkan data dukung pengusulan PSP BMN di lingkungan BPTJ berupa dokumentasi BMN, BAST BMN, BPKP dan STNK BMN (kendaraan operasional)</p>	<p>1. Surat Keputusan PSP BMN dari Sesjen atau DJKN</p> <p>2. Laporan pada aplikasi SIMAN BMN</p>	<p>1. Sulitnya mendapatkan data dukung pengusulan PSP BMN seperti dokumentasi BMN, BAST BMN sehingga proses pengusulan PSP BMN cukup lama dan kurang maksimal</p> <p>2. Aplikasi Siman yang kadang kala susah diakses karena membutuhkan koneksi internet yang cukup kuat</p>	<p>> Berkoordinasi dengan subbagian umum dan PPK untuk mendapatkan data dukung pengusulan PSP BMN berupa dokumentasi BMN dan BAST BMN</p> <p>> Berkoordinasi dengan subbagian umum agar dapat memfasilitasi koneksi internet yang kuat untuk mengakses aplikasi Siman</p>	
			18. Pengelolaan Administrasi Penggajian	<p>1. Mengelola Data Gaji dan Tunjangan Pegawai dan membuat Faktur Pajak / Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Gaji / Tunjangan Pegawai dengan menggunakan Aplikasi GPP</p> <p>2. Membuat Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Pegawai dikarenakan Mutasi, Pensiun dan Meninggal</p> <p>3. Melakukan Koreksi dan Validasi Data Gaji dan Tunjangan Pegawai dan membuat Faktur Pajak / Surat Setoran Pajak (SSP) Pembayaran Gaji / Tunjangan Pegawai</p>	Laporan penerimaan gaji dan tunjangan pegawai	<p>1. Terkait koordinasi antar bagian yang terlibat dalam pengelolaan gaji kurang maksimal sehingga menghambat percepatan output kegiatan</p> <p>2. Kapasitas penggunaan alat pengoperasian berupa komputer tidak berfungsi maksimal</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi antar bagian terkait</p> <p>2. Penggantian alat berupa komputer yang lebih memadai</p>	
IKK4 – Nilai AKIP yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	80%		1. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPTJ	Implementasi yang telah dilakukan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi atas PK Eselon III dan IV (6 - 10 Januari 2020) 2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi atas PK Eselon II (13 - 16 Januari 2020) 3. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi atas PK Eselon I (16 - 21 Januari 2020) 4. Upload terakhir dokumen PK dan Rencana Aksi atas PK di aplikasi e SAKIP REVIU (28 Februari 2020) 	Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi atas PK Tahun 2020 Eselon I, II, III dan IV	Dokumen Renstra BPTJ Tahun 2020-2024 belum ada, sehingga kesulitan menentukan sasaran program, indikator program, sasaran kegiatan, indikator kegiatan yang akan dimasukkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	Sudah dilaksanakan: Salah satu acuan penyusunan dokumen PK dan Rencana aksi atas PK adalah DIPA BPTJ Tahun 2020 Nomor : SP DIPA-022.13.1.015413/2020 terbit pada tanggal 12 November 2019, maka disusunlah dokumen PK tahun 2020 (DIPA Tahun 2020 masih mengacu pada Renstra BPTJ Tahun 2016-2019)	

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			2. Peningkatan Kapasitas Penyusunan SAKIP BPTJ	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Pelaksanaan Bimtek Tertunda dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19	Menyelenggarakan BIMTEK Pemanfaatan Aplikasi Capaian Kinerja (E-Performance dan E-SAKIP) setelah dinyatakan aman dari status darurat corona.
			3. Penyusunan Laporan Tahunan BPTJ	Telah dilaksanakan rapat 3 kali: 1. Rapat Penyusunan Laporan Tahunan Kemenhub dan BPTJ Tahun 2019 (5 Februari) 2. Rapat Pembahasan Draft Laptah Eselon II BPTJ Tahun 2019 (27-29 Februari) 3. RDK Pembahasan Draft Laptah Eselon II BPTJ Tahun 2019 (9 Maret)	1. 1 Laporan Tahunan Eselon I Tahun 2019 2. 4 Laporan Tahunan Eselon 2 Tahun 2019	Pembahasan kegiatan pada Laporan Tahunan Eselon II belum dilengkapi dokumentasi dan data dukung yang lengkap sehingga perlu beberapa kali direvisi.	Berkoordinasi secara intensif dengan PIC Penyusunan Laporan Tahunan Eselon II terkait perbaikan yang perlu dilakukan.
			4. Penyusunan LAKIP	Telah dilaksanakan rapat 1 kali: Rapat Penyusunan LAKIP di Lingkungan BPTJ (Tanggal 14 Maret)	1. 1 LAKIP Eselon I BPTJ 2019 2. 4 LAKIP Eselon II BPTJ 2019	Terdapat sejumlah sasaran dan indikator pada LAKIP Eselon II yang tidak tersusun dengan detail sehingga menunda penyelesaian LAKIP Eselon I	Berkoordinasi secara intensif dengan PIC Penyusunan LAKIP Eselon II terkait penambahan data dukung yang diperlukan.

Catatan:

- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) agar dapat mengacu pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi PK) yang telah disusun
- Softcopy tabel di atas dapat diunduh di bit.ly/MONEVBPTJ2020

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

Format Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bagian Kepegawaian dan Umum
Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
IKK 3 - Tingkat pemenuhan ASN Perhubungan yang kompeten di BPTJ	20%		1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan konsinyering yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			2. Pengadaan Pegawai di Lingkungan BPTJ	Pembentukan panitia penerimaan CPNS yang meliputi kegiatan seleksi administratif, pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Tersaringnya peserta yang lulus seleksi administratif untuk mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Jumlah peserta yang mendaftar semakin banyak, waktu pelaksanaan seleksi administratif dan pelaksanaan ujian SKD relatif singkat	Sudah terlaksana: Seleksi administratif dan Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
							Akan dilaksanakan: Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
			3. Pelaksanaan Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis di Lingkungan BPTJ	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: Kegiatan diklat dan bimtek setelah wabah pandemi COVID-19 hilang
			4. Sosialisasi Bidang Kepegawaian	Sosialisasi kepegawaian di lingkungan Terminal Baranangsiang pada tanggal 4 Maret 2020 di Hotel Sahira Pakuan, Bogor	Pemahaman tentang disiplin pegawai kepada seluruh pegawai di lingkungan Terminal Baranangsiang baik bagi PNS maupun non-PNS	Tidak semua pegawai di lingkungan Terminal Baranangsiang dapat hadir karena harus bertugas di Terminal	Sudah terlaksana: Koordinasi dengan Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Baranangsiang untuk kemajuan tingkat disiplin pegawai setelah sosialisasi dilaksanakan Akan dilaksanakan: Sosialisasi bagi unit kerja lainnya
			5. Pembinaan mental dan spiritual	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			6. Pembinaan Keprotokolan dan MC	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			7. Peningkatan Jiwa Korsa	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			8. Pembinaan Sistem Administrasi Perkantoran	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			9. Penyuluhan Gerakan Anti Narkoba	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			10. Kegiatan Pelantikan dan Serah Terima Jabatan BPTJ	Kegiatan sudah dilaksanakan pada saat adanya pelantikan pejabat di lingkungan kemenuh	Mengetahui pejabat yang dilantik di lingkungan BPTJ		
IKK4 – Nilai AKIP yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan	80%		1. Kegiatan Pengelolaan dan Penataan Arsip	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			2. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa item kegiatan yang sudah di kontraktualkan.	Tersedianya Peralatan dan Fasilitas Penunjang Perkantoran		
			3. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Sampai dengan saat ini rutinitas tiap bulan dalam pelaksanaan pembayan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan BPTJ	Hak dari masing-masing pegawai dapat diterima		
			4. Kegiatan Operasional Perkantoran	Sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa item kegiatan yang sudah di kontraktualkan.	Tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang dalam mendukung aktivitas bekerja.		
			5. Langgan Daya dan Jasa	Sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa item kegiatan yang sudah di kontraktualkan.	Tersedianya fasilitas-fasilitas penunjang dalam mendukung aktivitas bekerja.		
			6. Perawatan Ruang dan Halaman Kantor	Sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa item kegiatan yang sudah di kontraktualkan.	Terdapatnya perubahan-perubahan yang lebih baik di dalam ruang dan halaman kantor.		
			7. Perawatan dan Peralatan Mesin Kantor	Sampai dengan saat ini sudah terdapat beberapa item kegiatan yang sudah di kontraktualkan.	Terdapatnya barang-barang fasilitas perkantoran dalam kondisi baik kembali.		
			8. Peningkatan Kinerja Komputer	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ
			9. Pemeliharaan Jaringan Komputer	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan wabah pandemi COVID-19	Akan dilaksanakan: kegiatan di pembinaan yang melibatkan semua unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ

Catatan:

- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) agar dapat mengacu pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi PK) yang telah disusun
- Softcopy tabel di atas dapat diunduh di bit.ly/MONEVBPTJ2020

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

**Format Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bagian Hubungan Masyarakat
Triwulan I Tahun 2020**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
IKK 5 - Terbentuknya reputasi positif tentang kelembagaan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	55%		1. Penyelenggaraan Kegiatan Hubungan Media	Telah terlaksana satu kali kegiatan hubungan media dalam rangka kegiatan RAKOR RITJ 2020, Selasa 4 Februari 2020. (Tanpa menggunakan anggaran Humas)	Pemberitaan terkait RAKOR RITJ 2020	Selama Triwulan I Tahun 2020 BPTJ belum terdapat isu terkini yang dapat diangkat sebagai substansi kegiatan Hubungan Media meliputi Press background, Press Tour, maupun Jumpa Pers.	Akan dilaksanakan: Penyelenggaraan kegiatan hubungan media rencananya akan dilaksanakan dalam rangka massa angkutan Lebaran 2020. Namun hal tersebut masih bersifat tentatif mengingat situasi pandemi Covid 19 saat ini.
			2. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial dan Jejaring Komunikasi	1. Pengelolaan Media Sosial selama triwulan I tahun 2020 telah terlaksana secara mandiri. 2. Kegiatan Jejaring Komunikasi telah terlaksana sebanyak satu kali dalam rangka kegiatan RAKOR RITJ 2020. (Tanpa menggunakan anggaran Humas)	1. Korten harian media sosial yang diupload melalui media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter selama triwulan I 2020. 2. konten media sosial yang diupload oleh blogger dan pegiat media sosial saat penyelenggaraan RAKOR RITJ 2020	Selama triwulan I, Humas masih mencari pelaksana pekerjaan yang kompeten dengan latar belakang yang komprehensif dalam pengelolaan akun media sosial BPTJ.	Akan dilaksanakan: 1. Rapat konsinyering penyusunan materi BPTJ Goes to Campus dalam kegiatan Jejaring Komunikasi. 2. Kegiatan Jejaring Komunikasi rencananya juga akan dilaksanakan selama massa angkutan Lebaran 2020 namun masih bersifat tentatif mengingat situasi pandemi Covid 19 saat ini.
			3. Penyelenggaraan Analisis Berita dan Opini Publik	Telah terselenggara monitoring berita dan opini publik bulan Maret 2020	Hasil monitoring pemberitaan terkait BPTJ selama bulan Maret 2020	Belum adanya laporan yang merangkum hasil evaluasi monitoring bulanan.	Sudah terlaksana: Hasil monitoring pemberitaan terkait BPTJ selama bulan Maret 2020 Akan dilaksanakan : Monitoring pemberitaan terkait BPTJ bulan April hingga Desember 2020
			4. Pengadaan Peralatan dan Operasional Sistem Komunikasi Cepat	Dalam proses pengadaan peralatan dan operasional sistem komunikasi cepat oleh Pejabat PPK	Output belum tersedia sarana pengolah data dan operasional sistem komunikasi cepat.	Masih menunggu proses penyediaan peralatan dan operasional sistem komunikasi cepat yang masih berlangsung.	Akan dilaksanakan : Setelah proses penyediaan selesai, akan dilaksanakan penyusunan laporan Pengadaan Peralatan dan Operasional Sistem Komunikasi Cepat
			5. Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat	1. Telah dimulai pelaksanaan piket Contact Center (CC) 151 sejak tanggal 27 Januari dengan melibatkan 50 pegawai ASN dan PPNPN dari unit kerja Eselon II di lingkungan BPTJ	1. Dari hasil evaluasi sepanjang bulan Januari s.d. Maret 2020 telah masuk 58 pengaduan di Tier I dan 12 pengaduan yang dieskalasi ke Tier II serta telah ditindaklanjuti oleh direktorat terkait untuk penanganannya	Jumlah pengaduan yang masuk jika dibandingkan dengan unit Eselon I lainnya cenderung sangat minim, sehingga perlu dievaluasi lebih mendalam mengenai eksistensi BPTJ menurut pandangan publik.	Akan dilaksanakan: 1. Evaluasi bersama dengan sub sektor terkait mengenai penanganan pengaduan yang masuk dan kinerja petugas CC 151 BPTJ

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran					
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	
				<p>2. Telah dilaksanakan pembahasan secara intensif terkait penyusunan materi bahan pedoman bagi pelayan informasi publik di BPTJ</p> <p>Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Pelayanan Informasi Publik bekerjasama dengan Bagian Kepegawaian dan Umum Sekretariat BPTJ pada tanggal 12 Februari 2020</p>	<p>2. Telah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala BPTJ No. SK. 40 BPTJ Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Koordinator Kegiatan Contact Center 151 Tier II dan Honorarium Kementerian Perhubungan di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2020</p> <p>3. Telah dikeluarkan SOP CC 151 BPTJ No. 001/SOP/BPTJ/02/2020 tentang Pengaduan Informasi Melalui Contact Center 151</p>			<p>2. Updating content informasi sebagai acuan jawaban pengaduan</p>
			<p>6. Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Materi Publikasi (Non Pemberitaan)</p>	<p>1. BPTJ telah bekerjasama dengan media lokal untuk placement publikasi</p> <p>2. BPTJ dijadwalkan akan mengikuti Pameran Indo Builtech pada Akhir Juni mendatang</p> <p>3. Telah disusun materi publikasi berupa produksi video terkait himbauan Kepala BPTJ mengenai Himbauan Tidak Mudik dan Mengurangi Mobilitas di Masa Pandemi Covid-19</p>	<p>1. Telah dilakukan placement materi publikasi advertorial tentang himbauan tidak mudik pada kanal Detik</p> <p>2. Telah disusun materi publikasi berupa pemasangan spanduk dan banner di seluruh terminal yang berada di bawah tanggung jawab BPTJ mengenai pencegahan Covid-19 bekerjasama dengan Sub Bagian Umum</p> <p>3. Anggaran untuk pengalokasian dana pemuatan pada media lokal telah dilaksanakan selama Triwulan I.</p> <p>4. Summary bahan pameran/media luar ruang mengenai TOD di Jabodetabek sedang disiapkan</p>	<p>Terbatasnya isu mengenai materi publikasi menjadi tantangan khusus pada periode Triwulan I</p>	<p>Sudah terlaksana: Alokasi anggaran untuk pemuatan di media lokal telah terserap selama Triwulan I</p> <p>Akan dilaksanakan: Placement pemberitaan pada kanal informasi lainnya guna meningkatkan awareness masyarakat mengenai keberadaan BPTJ</p>	
			<p>7. Penyelenggaraan Kegiatan Penyusunan Dokumentasi</p>	<p>Seluruh kegiatan Kepala dan Sekretaris BPTJ sepanjang triwulan I tahun 2020 telah terdokumentasi dengan baik yang akan dikumpulkan menjadi album kegiatan pimpinan BPTJ</p>	<p>Dokumentasi kegiatan yang disimpan pada harddisk</p>	<p>Perlu koordinasi dengan staf pimpinan mengenai aktivitas rutin, situasional dan <i>urgent</i> sehingga seluruh kegiatan Kepala dan Sekretaris Badan dapat terdokumentasi dengan baik oleh Bagian Humas</p>	<p>Sudah terlaksana: Penyusunan dokumentasi Triwulan I</p> <p>Akan dilaksanakan : Produksi pembuatan video lanjutan</p>	
			<p>8. Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Website BPTJ</p>	<p>1. Telah dilaksanakan pembahasan intensif mengenai konten dan layout website BPTJ bersama Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustikom) Sekretariat Jenderal Kemenhub pada tanggal 28 Februari 2020</p> <p>2. Telah disusun SK Pengelolaan Content Website BPTJ</p>	<p>BPTJ telah bersurat kepada Kapustikom mengenai permohonan pengembangan content website BPTJ</p>	<p>Pustikom mengundur launching pengembangan aplikasi website krm wabah COVID-19 yang mengakibatkan terlambatnya upgrade aplikasi untuk pengembangan website BPTJ</p>	<p>Akan dilaksanakan : Penyusunan validasi content website BPTJ sekaligus upgrading layout layanan informasi</p>	

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			9. Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (PPID) BPTJ	<p>1. Penetapan SK PPID Kepala BPTJ masih dalam proses penandatanganan</p> <p>2. Telah masuk permohonan informasi yang masuk melalui PPID Kementerian Perhubungan dari Polda Metro Jaya (PMJ) mengenai permohonan informasi mengenai data kedatangan dan keberangkatan penumpang di setiap terminal yang berada di wilayah tanggung jawab BPTJ</p>	Telah disampaikan data kedatangan dan keberangkatan penumpang kepada BKIP untuk ditindaklanjuti ke PMJ	Pemantauan pelaksanaan PPID secara langsung di setiap terminal yang berada di bawah kewenangan BPTJ belum bisa dilaksanakan karena COVID-19	<p>Akan dilaksanakan :</p> <p>1. Pembahasan lanjutan mengenai laporan awal dengan melibatkan sub sektor di lingkungan BPTJ</p> <p>2. Koordinasi dengan Koordinator terminal untuk menyampaikan pelaksanaan PPID secara online</p>
			10. Penyelenggaraan Kegiatan Pencanangan Gerakan dan Kampanye Jalan Hijau	<p>1. Telah disusun timeline pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Telah berkoordinasi dengan Bagian Kepegawaian dan Umum mengenai proses lelang</p>	Dokumen lelang sedang disiapkan	Mengingat kampanye akan melibatkan banyak orang dan situasi COVID-19 yang terus berubah setiap waktunya maka pelaksanaan kampanye memerlukan perubahan konsep kegiatan yang berakibat pada perubahan strategi dan timeline kegiatan	<p>Akan dilaksanakan :</p> <p>Pembahasan awal konsep pencanangan Gerakan dan kampanye</p>

Catatan:

- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) agar dapat mengacu pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi PK) yang telah disusun
- Softcopy tabel di atas dapat diunduh di bit.ly/MONEVBPTJ2020

Lampiran Nota Dinas

Nomor :

Tanggal :

Format Kertas Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bagian Hukum
Triwulan I Tahun 2020

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
IKK 2 - Prosentase tersusunnya peraturan perundang-undangan dan terlaksananya reformasi birokrasi peraturan perundang-undangan	75%		1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Telah dilaksanakan rapat 6 kali : 1. Rapat Pembahasan Omnibus Law Bidang Transportasi (Tanggal 2 Januari 2020) 2. Rapat Penyusunan Naskah Akademik atas Perubahan PP No 32 tahun 2011 ttg Manajemen Rekayasa dan Kebutuhan Lalu Lintas (Tanggal 16-18 Januari 2020) 3. Rapat Pembahasan Permenhub ttg Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (Tanggal 30 Januari-1 Februari 2020) 4. Rapat Penyusunan Matrik Kewenangan Tugas dan Fungsi BPTJ berdasarkan PP 103 Tahun 2015 ttg BPTJ dan PM 110 Tahun 2018 ttg Ortaker BPTJ (Tanggal 20-23 Februari 2020) 5. Rapat Pembahasan Permenhub ttg Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada BPTJ (tanggal 12-14 Maret 2020) 6. Rapat Pembahasan Permenhub ttg Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Tanggal 7 April 2020)	1. Rancangan Permenhub tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan 2. PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan 3. PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019	1. Masih ada pembahasan lebih lanjut tentang Omnibus Law Bidang Transportasi 2. Dalam penyusunan RPM tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada BPTJ, masih menunggu domain website dari Pustikom Kemenhub yang hingga saat ini masih belum diberikan oleh Pustikom Kemenhub.	Sudah terlaksana: > Berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait Permenhub dan Perubahan PP > Melakukan koordinasi dengan Direktorat Angkutan BPTJ terkait dengan perkembangan pembuatan domain website perizinan online BPTJ oleh Pustikom Kemenhub Akan dilaksanakan: > Rapat lanjutan pembahasan Omnibus Law Bidang Transportasi > Terus memantau perkembangan Pustikom kemenhub dalam pembuatan domain website perizinan online BPTJ
			2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dilakukan perhitungan atas Capaian Kinerja (IKU) dan Pelaksanaan Rencana dan Program	Akan dilaksanakan: Proses pengumpulan data dan informasi produk hukum di BPTJ per triwulan I
			3. Sosialisasi Peraturan Teknis Terkait Bidang Bidang Transportasi	Kegiatan belum terlaksana	Output belum dihasilkan	Belum dilakukan perhitungan atas Capaian Kinerja (IKU) dan Pelaksanaan Rencana dan Program	Akan dilaksanakan: Pembahasan konsep timeline pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Penjabaran				
			Kegiatan	Implementasi	Output	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
			4. Pemberian Bantuan Hukum	Telah dilaksanakan rapat koordinasi Penyusunan Keterangan Presiden/Pemerintah atas Permohonan Hak Uji Materiil (<i>Judicial Review</i>) beberapa pasal dalam UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Mahkamah Konstitusi	Rancangan Keterangan Presiden	Masih membutuhkan masukan dari pakar dan ahli hukum terkait	Sudah terlaksana: Sudah dilakukan beberapa kali rapat koordinasi penyusunan Keterangan Presiden bersama Biro Hukum Akan Dilaksanakan: Rapat koordinasi lanjutan (finalisasi) penyusunan Keterangan Presiden melibatkan pakar dan ahli hukum
			5. Kerjasama Terkait di Bidang Transportasi	Telah dilaksanakan rapat 2 kali : 1. Rapat Persiapan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara BPTJ dengan BNPT tentang Penanggulangan Terorisme Bidang Transportasi di Wilayah Jabodetabek (Tanggal 23-25 Januari 2020)	1. Telah tersusun Draft Final Perjanjian Kerja Sama antara BPTJ dengan BNPT tentang Penanggulangan Terorisme Bidang Transportasi di Wilayah Jabodetabek	1. Menunggu konfirmasi pihak BNPT terkait teknis penandatanganan Perjanjian Kerja Sama	Sudah terlaksana: > Penyampaian draft final Perjanjian Kerja Sama antara BPTJ dengan BNPT > Penyampaian draft usulan Perjanjian Kerja Sama antara BPTJ dengan Jaksa Muda Bidang Intelijen
				2. Rapat pembahasan naskah Perjanjian Kerja Sama antara BPTJ dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI tentang Pengawasan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Transportasi di Wilayah Jabodetabek (Tanggal 13-15 Februari 2020)	2. Telah tersusun draft/konsep usulan Perjanjian Kerja Sama dari BPTJ dan penyampaian resmi ke Jamintel Kejaksaan RI	2. Belum ada jawaban resmi dari Jamintel Kejaksaan RI atas usulan draft/konsep Perjanjian Kerja Sama dari BPTJ	Akan dilaksanakan: > Koordinasi lanjut dengan BNPT terkait teknis penandatanganan Perjanjian Kerja Sama > Koordinasi lanjut dengan Jamintel RI terkait usulan draft Perjanjian Kerja Sama

Catatan:

- Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) agar dapat mengacu pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (Renaksi PK) yang telah disusun
- Softcopy tabel di atas dapat diunduh di bit.ly/MONEVBPTJ2020